

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Hubungan Internasional tidak seterusnya berkaitan dengan hubungan antar negara (*state actors*) . Hubungan Internasional di definisikan sebagai studi mengenai hubungan antar negara yang sederhana dan terlalu sempit. Ada berbagai macam ahli yang setuju bahwa studi Hubungan Internasional tidak hanya studi mengenai hubungan antar negara tetapi HI juga berkaitan dengan seluruh macam hubungan yang dijalankan oleh aktor-aktor non-negara (*non-state actors*) dan bisa juga dilakukan oleh hubungan antar individu yang memiliki pengaruh untuk hubungan negara. (Stephanie, 2012, p. 4)

Dalam perubahannya, Hubungan Internasional tidak hanya membicarakan mengenai *high politics* atau hubungan politik saja, namun Hubungan Internasional juga mengutamakan *low politics* yang dimana membahas mengenai kerjasama tepat kerjasama regional, multilateral maupun bilateral untuk persoalan pendidikan. (Yeyen & Muhammad, 2023, pp. 280-281)

Studi hubungan internasional dalam sejarah perubahannya memiliki sifat interdispliner yang berarti hubungan internasional akan terus berkaitan dengan nilai-nilai ilmu sosial yang menjadikan bentuk sifat keilmuannya saling dua arah. Interdispliner dalam studi HI akan lebih nyata jika sejarahnya tidak di lupakan serta studi hubungan internasional juga akan mandiri dan menyaksikan nilai-nilai

pemikiran serta proses perubahan studi hubungan internasional (Darmayadi, 2022, p. 12)

Hubungan internasional jika dilihat pada masa kini yaitu studi dan rakyat internasional dalam masa pertukaran atau transisi. Banyak faktor dalam hubungan internasional yang enggan mengalami perkembangan, namun kondisi lingkungan internasional yang memang sudah berubah dan akan terus berubah. Perubahan tersebut dikarenakan oleh perubahan sistem negara, berkembangnya teknologi yang pesat di masa kini serta peran yang kini menjadi sangat penting dari negara selain negara barat dan “*revolution of rising expectations*” yang dimana negara-negara berkembang. Oleh karena itu dalam ilmu hubungan internasional hal lama dan hal baru harus tercampur rata walaupun pusatnya masih pada sistem negara kebangsaan (*nation state system*). (Palmer, Norman, & Perkins, 1953, p. 135)

Ilmu hubungan internasional tidak hanya merujuk pada studi mengenai hubungan antar aktor-aktor di tingkat internasional seperti negara, organisasi internasional, lembaga individu dan non-pemerintah, dinamika politik, ekonomi sosial dan budaya, tetapi studi ilmu hubungan internasional juga seringkali mengacu pada studi pendidikan.

2.1.2 Diplomasi

Diplomasi di ambil dari kata Yunani “diploun” yang mempunyai arti “melipat”. “*The Chamber’s Twentieth Century Dictionary*” berpendapat diplomasi merupakan seni berunding, terutama mengenai perjanjian diantara

negara-negara dalam keahlian politik atau “*The Art of Negotiation, Especially of Treaties Between States: Political Skill*”. Diplomasi memfokuskan aktivitasnya serta memposisikan pada seni berundingnya. Menurut Ivo D. Duchachek, diplomasi didefinisikan menjadi praktik dilaksanakannya politik luar negeri oleh negara dengan menggunakan alat utama yaitu bernegosiasi dengan negara lainnya. (Sekretaris, 2020, p. 52)

Diplomasi sebagai disiplin studi dalam Hubungan Internasional digunakan sebagai strategi untuk mempromosikan, meningkatkan keberadaan, atau memperluas pengaruh suatu negara di negara lain demi mencapai kepentingan nasional masing-masing negara. Ini merupakan salah satu instrumen utama yang digunakan negara dalam menjalankan kebijakan luar negeri dan mencapai tujuan nasional, yang kemudian dapat menjadi aset bernilai atau merek suatu negara, serta mempengaruhi citra atau imej suatu negara. Diplomasi termasuk dalam konsep soft power yang memiliki berbagai bentuk, seperti diplomasi publik, diplomasi kedekatan, diplomasi kemanusiaan, diplomasi kekuatan, diplomasi pendidikan dan diplomasi budaya. (Tonny, 2008)

Diplomasi adalah cara berdiskusi dan berkomunikasi antara negara-negara untuk menyelesaikan konflik secara damai, yang berperan sebagai instrumen kebijakan luar negeri. Penting untuk dicatat bahwa diplomasi di era modern telah melibatkan aktor non-negara, meskipun secara teknis masih mewakili kepentingan negara tertentu. Selain itu, diplomasi saat ini tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian konflik, tetapi juga berfungsi untuk mempererat hubungan. Dalam

konteks ini, pendidikan dan budaya menjadi aspek penting dalam diplomasi. (Heywood, 2011)

Terdapat lima jenis aktivitas yang berkaitan dengan diplomasi publik: mendengarkan, advokasi, penyiaran internasional, diplomasi budaya, serta pertukaran internasional, dengan fokus utama pada pertukaran di bidang pendidikan dan budaya. (Cull, 2008) Dalam konteks dunia modern, paparan terhadap budaya, politik, dan sosial negara tuan rumah terjadi melalui pertukaran internasional umumnya, khususnya melalui pertukaran pendidikan. (Emily, 2015, pp. 223-241) Diplomasi relasional, atau diplomasi antar masyarakat, pertukaran pendidikan yaitu bagian dari kategori ini, dilakukan dengan tujuan jangka panjang. (Golan, 2013).

Pendidikan tinggi internasional diusahakan sebagai kesempatan mobilitas bagi mahasiswa yang berpotensi memberikan manfaat serta membangun hubungan intelektual, komersial, dan sosial yang dapat meningkatkan reputasi suatu negara dan memperkuat kapasitasnya untuk berperan serta dan berpengaruh dalam konteks regional atau global. Sebagian besar mahasiswa ini kemungkinan akan kembali ke posisi kepemimpinan di negara asalnya, dan diyakini bahwa kesan yang mereka bawa dari negara tempat mereka belajar lebih berpengaruh daripada pengetahuan teknis dan keterampilan yang mereka peroleh di sana.

Walaupun aktif dalam ranah pendidikan dan budaya, konsep diplomasi dalam kedua bidang ini pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari dimensi politik. Pertukaran yang didanai oleh negara, termasuk yang terjadi di lingkungan kampus, dianggap sebagai upaya politik yang melekat, dan meskipun terlihat netral secara

politis, hal ini tetap terkait erat dengan konteks politik yang lebih luas dari hubungan internasional. Upaya untuk mengambil bagian dalam program studi di luar negeri memiliki beragam tujuan, termasuk yang berkaitan dengan keamanan nasional dan kebijakan publik, dan tidak semata-mata tentang pencapaian tujuan individu semata. (Caroline & Ronaldo, 2023, p. 127)

2.1.3 Diplomasi Publik

Diplomasi Publik adalah bentuk diplomasi yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses diplomasi. Keterlibatan masyarakat ini membutuhkan penerapan strategis dari bidang hubungan masyarakat yang mempertimbangkan berbagai metode untuk mengintegrasikan kegiatan masyarakat sesuai dengan kebutuhan entitas yang terlibat, baik itu organisasi maupun negara. Penilaian hasilnya sangat bergantung pada pemahaman yang mendalam tentang pandangan masyarakat dan bagaimana pandangan tersebut dapat membangun apresiasi serta pengakuan terhadap entitas tersebut. Memperoleh citra yang positif memerlukan kesan yang tepat, didasarkan pada pengalaman, pengetahuan, dan pemahaman yang akurat terhadap fakta-fakta yang ada. (Asep, 2012, p. 66)

(Ross, 2003, pp. 23-26) Koordinator Bidang Diplomasi Publik Departemen Luar Negeri AS, berpendapat bahwa ada tujuh prinsip yang harus dipahami agar diplomasi publik berhasil dalam upaya memberi informasi, melibatkan, dan mempengaruhi publik asing. Pertama, koordinasi kebijakan nasional penting untuk memastikan bahwa aktivitas diplomasi publik mendukung kepentingan nasional

dan memenuhi kewajiban internasional negara. Kedua, kebijakan harus didukung dengan alasan dan logika yang memadai. Ketiga, pesan yang disampaikan harus konsisten, kredibel, dan dapat dipercaya, mengingat keragaman target audiensnya. Keempat, perlu menghindari kontradiksi dalam pesan yang disampaikan dan memastikan konsistensi desain pesan, dengan memperhitungkan cepatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Kelima, memanfaatkan berbagai saluran komunikasi seperti internet, media massa, dan kegiatan budaya untuk menjangkau berbagai kelompok sasaran. Keenam, membangun kemitraan dengan sektor swasta dan aktor non-negara lainnya. Ketujuh, fondasi kepercayaan dan pemahaman dapat dibangun melalui komitmen dan dialog yang terus menerus.

Diplomasi publik merupakan usaha untuk terwujudnya kepentingan nasional suatu negara guna mewujudkan nilai dan informasi untuk masyarakat luar negeri dengan tujuan memperkenalkan dan memperluas relasi di luar negeri. Oleh karena itu diciptakannya sistem hubungan pemerintah terhadap masyarakat dengan melakukan kegiatan diplomasi public dengan tujuan masyarakat internasional memiliki pandangan yang baik mengenai negara sebagai acuan sosial untuk pencapaian kepentingan yang lebih meluas. Dalam hal tersebut, pelaksanaan program *New Colombo Plan* dipahami sebagai kegiatan dari diplomasi publik yang dimana memperlihatkan peran yang stabil untuk mendukung hubungan baik antara Australia dengan Indonesia, yang dimana dalam progres dijalankannya program *New Colombo Plan* ini tidak hanya pemerintah saja yang terlibat namun juga peran publik yang membuat aktivitas diplomasi publik ini lebih berpengaruh. Budaya dan Pendidikan mampu berkecimpung dalam kegiatan diplomasi publik ini karena

budaya dan pendidikan merupakan salah satu faktor utama yang dipakai untuk menciptakan kesan dan citra dalam strategi dalam diplomasi publik dan hubungan *“people to people”*.

Mahasiswa merupakan salah satu elemen non-pemerintah yang memiliki peranan penting dalam upaya diplomasi suatu negara. Dengan semakin meluasnya perkembangan politik global, pemerintah tidak lagi menjadi satu-satunya aktor dalam urusan diplomasi. Mahasiswa memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan pertukaran pelajar ke luar negeri. Melalui ini, mereka dapat membentuk interaksi sosial, menyebarkan ideologi dan budaya, serta mengadakan diskusi dan pertukaran gagasan antara mahasiswa Indonesia dengan masyarakat dan akademisi di kampus dan negara tujuan mereka. Ini merupakan bagian dari upaya untuk memperluas cakupan diplomasi yang lebih inklusif dan beragam (Dadang & Siska, 2019).

Salah satu cara dalam berdiplomasi adalah melalui diplomasi publik, yang dilakukan secara terbuka dengan maksud untuk menarik perhatian masyarakat umum terhadap aktivitas diplomasi yang tengah berlangsung. Pendidikan memiliki hubungan yang erat dengan kebudayaan, terutama dalam proses sosialisasi, interaksi, dan upaya untuk melestarikannya. Proses pendidikan tidak hanya mempengaruhi pengetahuan individu, tetapi juga membentuk identitas budaya dan nilai-nilai yang mereka anut. Ini menjadikan pendidikan sebagai salah satu elemen kunci dalam memperkuat keberhasilan diplomasi publik (Tri , 2019).

Diplomasi yang tesusun sempurna di antara negara tidak hanya dilihat dari proses hubungan yang tentram saja tetapi dilihat bagaimana negara tersebut Menyusun sebuah rencana yang nantinya akan menjadi sebuah citra positif di pandangan masyarakat asing. Dalam ilmu hubungan internasional, sebuah negara menjadikan aktivitas diplomasi dengan landasan utama untuk kepentingan nasional. Adanya aktivitas negosiasi merubah bentuk diplomasi yang berawal memiliki sifat mendukung nilai-nilai tradisional atau konservatif, kini menjadi modern dan mengikuti kondisi dalam waktu saat ini atau kontemporer, salah satu jenis diplomasi yang memiliki sifat tersebut yakni Diplomasi Publik. Kegiatan yang dijalani oleh pemerintah dengan membuat sebuah dampak atau sudut pandang terhadap masyarakat dengan memperkenalkan kepentingan nasionalnya merupakan arti sederhana dari Diplomasi Publik (Shaun, 2005).

Strategi penyebaran nilai dan budaya dalam kerangka diplomasi publik menempatkan diplomasi ini sebagai salah satu wujud dari *soft power*. Hal ini karena diplomasi publik menggunakan pendekatan yang lebih halus dan tidak mengandalkan paksaan untuk menunjukkan kekuatan dan pengaruh suatu negara. Dalam definisi, *soft power* merujuk pada kemampuan suatu negara untuk memengaruhi pihak lain guna mencapai tujuan dan kepentingan nasionalnya dengan cara yang persuasif. Pendekatan ini sering dilakukan melalui promosi nilai-nilai, budaya, serta ideologi yang dimiliki negara tersebut (Nye & Joseph, 2008).

Kemampuan *soft power* yang dimiliki oleh suatu negara memiliki potensi untuk memengaruhi kebijakan yang diambil oleh negara lain. Dalam konteks ini, diplomasi publik memainkan peran penting sebagai instrumen strategis yang

digunakan negara untuk mencapai tujuannya tanpa harus mengandalkan kekuatan koersif, seperti kekuatan militer, yang bisa memicu konflik. Selain itu, diplomasi publik juga berfungsi sebagai sarana bagi negara untuk membangun citra positif dan persepsi yang menguntungkan di mata masyarakat internasional, sehingga memperkuat posisi dan reputasi negara tersebut di kancah global (Jan, 2005).

Diplomasi publik telah menjadi alat penting bagi berbagai negara untuk mencapai tujuan politik luar negeri mereka. Pendekatan dalam diplomasi publik sering kali melibatkan proses yang berfokus pada interaksi antara pemerintah dengan masyarakat atau antara masyarakat di berbagai negara. Oleh karena itu, proses diplomasi tidak selalu terbatas pada aktor pemerintah yang bertindak secara resmi. Di dalamnya, terdapat peran penting dari aktor non-pemerintah, seperti masyarakat sipil, yang turut berkontribusi.

Dalam konteks ini, diplomasi publik dapat memanfaatkan berbagai metode, salah satunya melalui sektor pendidikan. Pendidikan menjadi sarana yang ideal untuk membangun hubungan jangka panjang yang kokoh, baik dengan negara lain maupun dengan publik internasional. Banyak yang berpendapat bahwa pendidikan adalah salah satu cara utama untuk menciptakan masyarakat yang semakin terdidik dan berpengetahuan. Dengan demikian, upaya mobilisasi pendidikan ke negara lain diyakini dapat memberikan pengalaman berharga dan wawasan mendalam mengenai budaya baru. Hal ini pada akhirnya dapat mendorong terciptanya pemahaman bersama (*mutual understanding*) di antara masyarakat internasional. Selain itu, mobilitas pelajar dianggap sebagai metode yang sangat produktif dalam membina hubungan geopolitik dan mempererat koneksi antarnegara. Terutama di

tingkat regional, di mana pendidikan internasional menjadi alat yang efektif untuk memperkuat aliansi ekonomi dan politik antarnegara tetangga, sehingga menciptakan hubungan yang lebih solid dan kooperatif (Jane, 2004).

2.1.4 Kepentingan Nasional

Pentingnya kepentingan negara yang berakar pada kekuasaan yang dimiliki oleh negara-negara tersebut, seperti yang diungkapkan oleh Burchill dan dipresentasikan secara efektif oleh Hans J. Morgenthau, adalah untuk memastikan bahwa negara-negara menjaga elemen-elemen kekuatan mereka agar dapat menjamin kedaulatan mereka di tengah negara-negara lain, dan sebagai hasilnya, menjaga keseimbangan kekuatan politik secara global. Dalam konteks hubungan internasional, tindakan negara bertujuan untuk menjaga stabilitas dan keamanan dengan memastikan bahwa kekuatan yang dimilikinya tetap relevan dan dapat menegakkan kedaulatan mereka di antara negara-negara lain. Dengan demikian, menjaga konstelasi kekuatan politik di tingkat internasional menjadi imperatif untuk memelihara stabilitas global (Ahmad , 2014).

Menurut Donald E. Nuechterlein, kepentingan nasional dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori utama yang mendorong suatu negara untuk terlibat dalam hubungan internasional. Pertama, ada kepentingan dalam pertahanan dan keamanan, yang melibatkan perlindungan terhadap wilayah dan penduduk suatu negara dari ancaman yang mungkin berasal dari negara lain. Kedua, terdapat kepentingan ekonomi, yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan ekonomi negara dengan cara memperluas kerjasama ekonomi dengan negara lain. Ketiga, ada kepentingan dalam menjaga tatanan internasional, yang melibatkan

pemeliharaan sistem politik dan ekonomi internasional untuk menciptakan kondisi yang aman bagi rakyat dan bisnis untuk beroperasi di luar wilayah negara mereka. Dan terakhir, terdapat kepentingan ideologis, yang mencakup perlindungan dan pembelaan terhadap nilai-nilai ideologi yang dimiliki oleh suatu negara dari ancaman yang berasal dari ideologi negara lain. Dengan memperhatikan keempat kategori ini, negara-negara dapat merumuskan dan menjalankan kebijakan luar negeri mereka sesuai dengan kepentingan fundamental yang mereka miliki (Donald, 1979).

Kepentingan nasional bertujuan untuk memberikan pedoman bagi para pemimpin suatu negara dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan hubungan luar negeri. Kebijakan luar negeri ini meliputi strategi, tujuan, panduan, metode, dan aspek lainnya, yang memungkinkan negara tersebut untuk berinteraksi dengan negara lain serta pelaku non-negara lainnya. Dengan demikian, kepentingan nasional berfungsi sebagai landasan bagi negara dalam menjalankan diplomasi dan mengejar kepentingan mereka di tingkat internasional.

Menurut pengelompokan berdasarkan kepentingannya, ada dua klasifikasi utama:

1. Kepentingan Primer adalah kepentingan yang paling utama, yang menekankan bahwa perlindungan identitas politik dan budaya suatu negara harus dijaga dengan ketegasan, dan negara harus bertindak tanpa kompromi untuk memenuhi kepentingan ini.

2. Kepentingan Sekunder muncul ketika kepentingan primer telah terpenuhi. Ini adalah kepentingan yang berkembang setelah kepentingan utama tercapai.

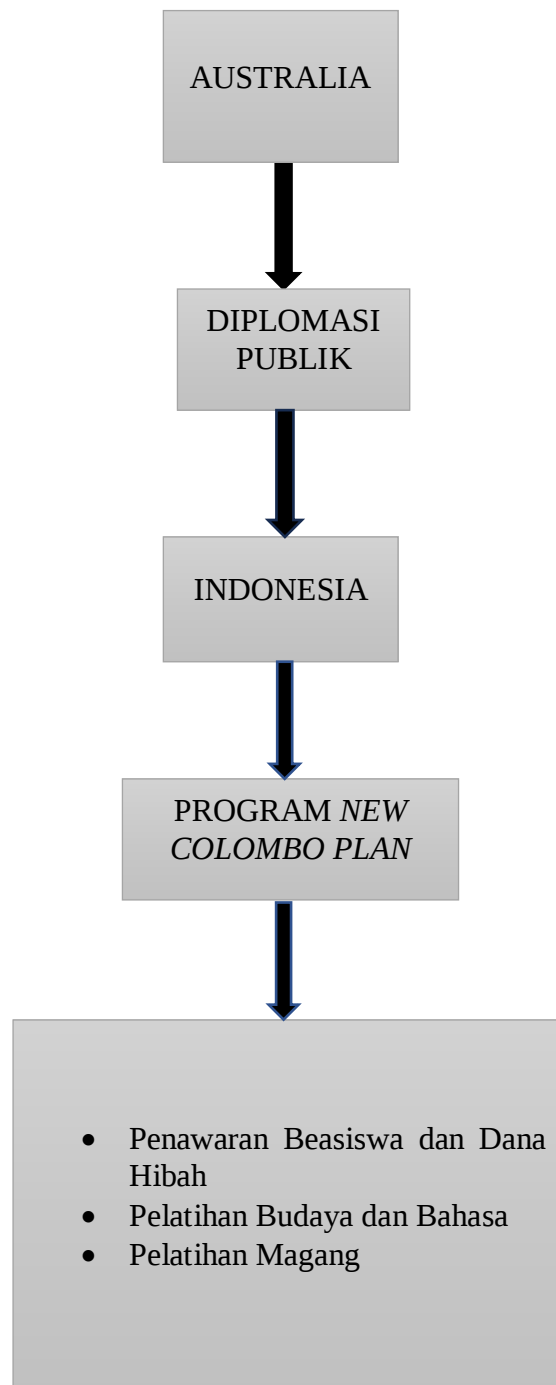
Berdasarkan sifatnya, kepentingan nasional dapat dibagi menjadi:

1. Kepentingan Permanen adalah kepentingan yang konsisten dan berkelanjutan dalam jangka waktu yang panjang.
2. Kepentingan Variabel adalah kepentingan yang dapat berubah sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada di negara tersebut.

2.2 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan penjelasan beberapa teori pendukung penelitian ini dalam tinjauan pustaka tersebut, peneliti menginterpretasikan kerangka pemikiran supaya mampu mempermudah proses penelitian dengan menggunakan teori-teori tersebut.

Penelitian ini, peneliti akan membahas mengenai upaya diplomasi publik yang dilakukan oleh Australia terhadap Indonesia melalui program *New Colombo Plan*. Program ini diciptakan memiliki tujuan guna menyebarluaskan dan meningkatkan pengaruh Australia di kawasan Asia Pasifik untuk menjadikan mobilitas pelajar sebagai fokus utama dari program *New Colombo Plan* karena Untuk Australia, diplomasi bukan dilihat sebagai ajang untuk saling berlomba-lomba mengenai popularitas antar negara, namun sebagai bentuk pengertian mengenai bagaimana negara lain melihat Australia dalam usaha untuk memperluas dampak dan kemampuan yang dimiliki



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran